

MERAJUT DENGAN TANAH, MENJEJAK DENGAN SEKOLAH¹

"GERAKAN PERLAWANAN ATAS NEOLIBERALISME DI DESA PERTANIAN SARIMUKTI"

Yuda Rasyadian

ABSTRAK

Tulisan ini berupaya untuk membahas bagaimana neoliberalisme telah masuk ke dalam sendi-sendi perekonomian pedesaan. Penelitian ini dilakukan di desa Sarimukti, kecamatan Pasirwangi, kabupaten Garut, provinsi Jawa Barat. Di desa ini digambarkan bagaimana tangan-tangan 'privatisasi' datang membabi buta, dengan tengkulak sebagai aktor sentralnya. Keberadaan neoliberalisme melalui penetrasi pasar, telah memunculkan bentuk resistensi tingkat lokal melalui sebuah institusi sekolah, SMK Pertanian Sarimukti. Penelitian ini menggunakan paradigma Marxian dengan konsep perjuangan kelas melalui pendidikan berbasis alam. Perlawanan yang juga dipicu oleh kelas menengah ini merepresentasikan konsep 'hidden transcript'-nya James Scott pada teori-teori gerakan sosial. Namun ada bentuk baru dalam gerak 'hidden transcript' terkait dengan gejala yang muncul di desa Sarimukti. Jadi, tulisan ini sekaligus juga sebagai usaha kritis untuk melengkapi konsep Scott tersebut.

Kata Kunci: *neoliberalisme, perlawanan, privatisasi, hidden transcript, pendidikan, tengkulak*

"Kita tak bisa memiliki pendidikan tanpa revolusi. Kita telah mencoba pendidikan damai selama 1900 tahun.. mari kita coba revolusi, dan kita lihat apa yang dapat dilakukannya sekarang."
(Hellen Keller)

¹ Ucapan terimakasih sebesarnya teruntuk Putri Prameswari dan Gaffari Ramadian, atas kritik dan saran yang berharga kepada penulis. Ucapan terimakasih juga untuk Yayasan Kampung Halaman, karena ide untuk tema tulisan ini berawal dari keterlibatan penulis di program 'Sekolah Remaja 2011 Kampung Halaman' dimana desa Sarimukti (Garut) sebagai salah satu site program.

Sebuah Pendahuluan: Neoliberalisme

Saat mendengar kata ‘neoliberalisme’ rata-rata dari kita akan membayangkan tentang sesuatu hal besar yang bergerak dalam era modernisasi atau era pembangunan. Apa itu neoliberalisme? Sebenarnya terdapat beberapa – atau bahkan banyak- pandangan dari para akademisi yang mendefinisikan apa itu neoliberalisme, atau apa itu ideologi neoliberal serta apa maksud darinya. Bagi Davis (2006: p.89-3) misalnya, neoliberalisme berfungsi sebagai proyek politik dan ekonomi dalam kerangka proyek pembangunan. Lalu bagi Priyono (2006: 2) fungsi neoliberalisme bukan hanya tentang statistik ekonomi, terlebih sebagai bangunan ideologi tentang manusia dan pengaturan masyarakat.

Saya tidak akan membahas secara detail, atau membahas penuh dengan analisa-analisa tertentu tentang ideologi neoliberal sendiri. Dalam bagian ini saya hanya akan memberikan garis besar bagaimana istilah neoliberalisme didefinisikan dan dalam kerangka seperti apa ia digunakan. Dari semua pandangan, saya menemukan kesepakatan bahwa neoliberalisme itu lahir dari –apa yang disebut- bentuk aliran ekonomi liberalisme klasik dimana cikal bakalnya dipicu oleh karya Adam Smith yang monumental, *The Wealth of Nations*, di tahun 1776 (Khudori, 2004: 15). Smith menganjurkan agar pemerintah membiarkan mekanisme pasar bekerja dengan logikanya sendiri, melakukan deregulasi, serta menghilangkan segala bentuk hambatan (tarif dan non-tarif) dan restriksi. Selanjutnya, bagi Smith, apabila dorongan untuk mencari keuntungan individual adalah kapasitas yang alamiah, maka tidak boleh ada intervensi negara atau monopoli negara karena hal itu hanya akan mengganggu kebebasan individu dalam berkompetisi (Robinson, 1986). Jadi, penekanannya adalah dilucutinya peran pemerintah agar tidak terus-menerus melakukan kontrol terhadap semua sektor publik, tapi membiarkan sektor swasta mengambil-alih. Inilah representasi ideologi liberalisme lama.

Ide liberalisme sendiri sebenarnya telah masuk ke Indonesia pada zaman kolonialisme Inggris (pasca kekuasaan H.M.Daendels dari Belanda tahun 1808-1811)² yang dipimpin oleh Thomas Stamford Raffles. Raffles-lah yang pertama kali menerapkan secara nyata kebijakan liberal tersebut: dengan adanya *land rent system* (sistem persewaan tanah), menghapus sistem penyerahan paksa (hasil bumi) dengan harga yang tidak adil, menghapus *rodi*, dan menentang *stelsel* (tanam paksa) yang menguntungkan aristokrasi ‘feodal’. Walau kemudian pada masa krisis di negeri Belanda, raja Willem I menyerahkan kekuasaan Hindia-Belanda kepada Van Den Bosch yang kembali menerapkan sistem tanam paksa

2 Pengetahuan ini saya dapatkan di perkuliahan *Sejarah Pedesaan Abad 19-20* jurusan Sejarah UGM saat saya menempuh studi S1 Antropologi, yang diampu oleh Prof.Dr. Djoko Suryo. Penjelasan ini juga dipaparkan oleh Frans Husken (1998: 27) bahwa sebenarnya pada tahun 1794 pelopor liberalisme Belanda, Dirk van Hogendorp, sudah memperjuangkan penghapusan pemilikan tanah yang bersifat komunal dan kerja rodi yang dinilainya sebagai penyebab utama macetnya ekonomi di Jawa.

dengan versi yang lebih halus sesudah tahun 1830 (Husken, 1998: 21). Lalu jika kita bertanya kapan istilah neoliberalisme muncul, ada dua pandangan besar yang dapat saya paparkan, dimana keduanya memiliki keterkaitan.

Pada awal dasawarsa 1930-an, Jerman yang sedang dihantui fasisme (dalam suasana ganjil campuran antara totalitarianisme dan kolektivisme) mendorong sekawanan ahli ekonomi dan hukum yang terkait dengan Universitas Freiburg mengembangkan suatu gagasan ekonomi-politik liberal yang kemudian disebut ‘Mazhab Freiburg’ (Priyono, 2006: 2-3). Kemudian lewat jurnal bernama *Ordo* (kurang lebih berarti ‘tatanan’) mereka menyebarkan gagasannya, yang diterbitkan dari kota Dusseldorf. Itulah mengapa gagasan mereka kemudian disebut Mazhab Ordo-Liberal. Namun, pada awalnya Ordo-Liberal sering kali juga disebut ‘Neo-Liberal’³.

Dalam waktu yang tidak begitu jauh, sebuah sekte dari jaringan mazhab Freiburg diatas muncul di Amerika dengan mengadopsi mazhab Ordo-Liberal, yaitu mazhab Chicago⁴ (yang memiliki keterkaitan dengan pemikir Ordo-Liberal). Inilah mazhab yang di kemudian hari disebut kaum ‘libertarian’. Lalu pada saat rezim Augusto Pinochet di Chile (tahun 1973) mengadopsi sistem ekonomi-politik mazhab Chicago dalam corak yang ekstrem, Pinochet mendapatkan pertentangan dan demonstrasi besar-besaran dari para pejuang demokrasi Amerika Latin. Saat Pinochet berkuasa, para pemegang kebijakan ekonominya adalah sekelompok ekonom Chile murid para libertarian di Universitas Chicago. Itulah yang membuat para pejuang demokrasi di Amerika Latin lalu menyebut para ‘*Chicago boys*’ ini sebagai kaum neo-liberal (Priyono, 2006: 5). Dari sini kita bisa lihat, kalau neoliberalisme awalnya menjadi istilah yang digunakan oleh para pejuang demokrasi Amerika Latin tahun 1973-1990 untuk menggambarkan watak ideologis kolusi antara rezim kediktatoran dan ekonomi pasar-bebas dalam coraknya yang ekstrem. Inilah pandangan pertama tentang awal munculnya istilah neoliberalisme.

Pandangan yang kedua berasal dari penjelasan Noam Chomsky; istilah neoliberalisme pertama kali digagas sebagai suatu rangkaian prinsip-prinsip berorientasi pasar yang dirancang oleh pemerintah Amerika Serikat bersama lembaga keuangan internasional yang berkuasa pasca Perang Dunia II (Chomsky,

3 Gagasan Ordo-Liberal dipandu oleh pertanyaan konkret begini: apabila persoalan kaum liberal di abad ke-18 dan ke-19 adalah bagaimana menciptakan kebebasan ekonomi dalam tata-negara yang tidak bebas, masalah kaum liberal di paroh pertama abad ke-20 adalah bagaimana mendirikan tata-negara dalam suasana kebebasan ekonomi yang sudah ada (Lemke, 2001, dalam Priyono, 2006: 4 & 17). Cukup pasti persoalan ini mencerminkan kegelisahan para pemikir Ordo-Liberal atas kekosongan bangunan tata-negara di Jerman yang luluh-lantak setelah kekalahan Nazi dan kejatuhan Hitler.

4 Penggerak utamanya adalah para ekonom yang terkait dengan Universitas Chicago setelah Perang Dunia II, seperti Milton Friedman, Friedrich von Hayek, Gary Becker, dan George Stigler.

2003: 4). Gagasan dan ideologi ini juga dikenal sebagai Konsensus Washington sebagai era lahirnya istilah neoliberalisme. Walaupun sebenarnya saya dapat menyimpulkan bahwa ide gagasan yang dibangun pemerintah Amerika tersebut juga diadopsi dari gagasan ekonomi-politik mazhab Chicago yang saat itu pun sedang berkembang pasca Perang Dunia II (dengan para pemikir ekonomi dari Universitas Chicago).

Lalu apa bedanya antara liberalisme lama dengan neoliberalisme? Menurut Priyono (2006: 5) awalan ‘neo’ (yang artinya ‘baru’) dipakai untuk membedakan diri dari liberalisme abad ke-18 dan ke-19, dengan memasukkan kritik dari gagasan sosialisme. Tapi mari kita lihat prinsip dasar kebijakan dari Konsensus Washington yang di kemukakan Chomsky, yaitu: liberalisasi perdagangan dan keuangan, biarkan pasar menentukan harga (“dapatkan harga yang tepat”), akhiri inflasi (stabilitas makro-ekonomi), dan privatisasi.

Jika kita bandingkan penjelasan Chomsky tersebut dengan konsep aliran liberalisme klasik dari Adam Smith serta gagasan ‘pertanyaan konkret’ Ordo-Liberal (pada *catatan kaki* nomor tiga), kita akan menemukan dua tanda evolusi liberal yang membedakan liberalisme lama dengan neoliberalisme. Tanda pertama; mendirikan tata-negara dalam suasana ‘kebebasan ekonomi yang sudah ada’, dimana sebelumnya (era liberalisme klasik) ingin menciptakan ‘kebebasan ekonomi dalam tata-negara yang tidak bebas’. Kedua; munculnya terminologi *privatisasi*, yang menekankan kepada aspek penjualan suatu aset kepada publik dengan tidak dihalangi oleh batas-batas konvensional suatu negara (dimana sebelumnya Adam Smith menawarkan gagasannya untuk individu-individu berkompetisi dalam batas suatu negara). Michel Foucault menyebut hal itu sebagai absennya seni sosialis dari suatu negara (dalam Ferguson, 2009: 167). Dua hal inilah yang menurut saya menjadi tanda pembedanya. Chomsky memang menjelaskan bahwa istilah neoliberalisme juga tidak digunakan secara umum di seluruh dunia, termasuk di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, istilah neo-liberal dalam pengertian dewasa ini lebih disebut dengan istilah ‘libertarian’ (Priyono, 2006: 17)⁵ atau juga Konsensus Washington (dalam paparan Chomsky).

Saat sirkulasi kapital pada era pasca-kolonial⁶ berkembang pesat,

5 Dengan berpegang kepada sebuah literatur berjudul *The Economist*, Priyono menjelaskan bahwa Istilah ‘neo-liberal’ adalah istilah yang lebih dekat dengan sejarah pemikiran politik Eropa Barat (spektrum konservatif – liberal – sosial progresif) daripada dengan sejarah politik Amerika Serikat (spektrum konservatif – liberal). Istilah ‘sosialis’ di Eropa lebih dekat dengan kategori ‘liberal’ di Amerika Serikat, dan istilah ‘liberal’ di Amerika Serikat lebih dekat dengan kategori ‘sosialis’ di Eropa daripada dengan istilah ‘liberal’ di Eropa.

6 Semenjak komunisme diruntuhkan, ide tentang sosialisme menjadi basi dan kuno. Rekonstruksi dan pembaharuan yang diterapkan oleh negara-negara di dunia pasca-kolonial menunjukkan bahwa “demokrasi politik dan ekonomi yang sejati” adalah gagasan yang seharusnya diambil untuk mengakhiri kolonialisme formal dan demi terciptanya kesetaraan relatif dalam hal akses sumber daya, materi, informasi, dan lainnya (Chomsky, 2003: 85, 129). Tetapi pada kenyataannya,

privatisasi (sebagai kekuatan inti dari neoliberalisme) diamini sebagai konsep penting dalam proses ekonomi pasar yang diterapkan besar-besaran di segala sendi perkotaan maupun di pedesaan. Bagi Khudori (2004: 14-16) ide neoliberalisme adalah pemujaan terhadap pasar (istilah lain: fundamentalisme pasar), yaitu para pemeluk neoliberalisme percaya bahwa tidak hanya produksi, distribusi, dan konsumsi yang tunduk pada hukum pasar, tapi seluruh aspek kehidupan. Tak ketinggalan Chomsky (2003: 15) dengan keras mendefinisikan bahwa faham neoliberalisme sejatinya adalah mengacu pada kebijakan dimana sekelompok kecil pihak swasta yang saling terkait diizinkan untuk mengontrol sebanyak mungkin kehidupan sosial dalam rangka memaksimalkan keuntungan pribadi mereka.

Dari semua pandangan yang saya kemukakan, konsep neoliberalisme selalu memiliki kecenderungan untuk membuka ruang perdebatan bagi pemikir-pemikir modern yang ingin memihak, mengkritik, atau menolak neoliberalisme. Namun pada intinya, ideologi neoliberal ini mengacu kepada situasi dan hasil yang sama, yaitu mengakomodasi pemilik modal (atau orang kaya) menjadi semakin kaya, sedangkan pihak yang tidak memiliki akses terhadap modal (orang miskin, misalnya: buruh) menjadi semakin miskin. Era neoliberalisme adalah era ketika kekuatan bisnis tumbuh semakin kuat dan agresif, serta menghadapi lebih sedikit oposisi yang terorganisir dari sebelumnya (Chomsky, 2003: 14). Gagasan tentang neoliberalisme sebenarnya bukan merupakan gagasan yang sama sekali baru. Itu hanyalah versi terbaru dari apa yang disebut Marx sebagai perjuangan segelintir orang kaya yang ingin membatasi hingga ke titik minimal hak politis dan kekuatan sipil dari masyarakat luas. Bahkan Ferguson (2009: 166) mengekspresikannya dalam sebuah bentuk kalimat yang sederhana: “neoliberalisme adalah hal yang buruk untuk para pekerja dan orang miskin, oleh karena itulah kita harus melawannya!”.

Sebenarnya semua definisi dan penjelasan teoritis tentang neoliberalisme hampir tidak ada yang berbeda substansi serta gejala-gejala yang muncul dari diterapkannya ideologi tersebut. Sejauh ini saya merasa paling sepakat dengan penjelasan David Harvey, yang mendefinisikan dengan aspek-aspek yang jelas serta paling komprehensif tentang bagaimana ideologi neoliberal dirumuskan, yaitu:

Neoliberalism is the first instance a theory of political economic practices which proposes that human well-being can best be advanced by the maximization of entrepreneurial freedoms within an institutional framework characterized by private property rights, individual liberty, free markets and free trade (Harvey, 2006: 145).

ideologi neoliberal (dengan selimut ‘berinti pada demokrasi’) menjadi arah yang diambil untuk mencegah munculnya demokrasi yang sejati. Sehingga ungkapan yang menyebutkan “demokrasi adalah pijakan yang mutlak diperlukan dan diperjuangkan bagi semua masyarakat pasca-kapitalis” hanya menjadi gagasan utopis belaka.

Sarimukti: Wajah Sebuah Desa dalam Transisi

Sapaan hangat dari sejuknya udara akan langsung menerpa wajah saat kita menginjakkan kaki di desa Sarimukti yang berada cukup tinggi dari permukaan laut. Desa Sarimukti terletak di kecamatan Pasirwangi, kabupaten Garut, provinsi Jawa Barat. Saat kita ingin berkunjung ke desa ini, kita akan melewati pemandangan dengan hamparan luas sawah dan gunung sepanjang perjalanan. Lokasi desa Sarimukti berada di arah gunung Papandayan dan gunung Cikurai, yang berjarak 47 km dari ibukota kabupaten Garut. Perjalanan kesana tidaklah terlalu mulus, karena infrastruktur jalan yang ada membuat mobil atau motor dipaksa untuk menjadi tanggung, apalagi saat musim hujan.

Jika kita melihat kondisi desa Sarimukti, pembaca tidak akan menyangka bahwa desa ini adalah desa yang tertinggal (dari konteks sosio-ekonomi), begitu pula saya pada awalnya. Ketika sampai disana, terlihat sepi wajah desa dengan kita akan berucap, “wow, desa ini kaya dan subur!”. Namun Pak Dadang Darajat, kepala desa Sarimukti, pada masa kepemimpinannya sekarang sempat berkata: “desa Sarimukti merupakan termasuk desa yang tertinggal,”⁷. Sebenarnya desa Sarimukti memang memiliki potensi tanah yang sangat subur dan sangat baik untuk pertanian atau perkebunan. Masyarakat disana bercocok-tanam kentang dan jenis sayuran yang dikembangkan, seperti kubis dan cabai. Panen yang dihasilkan pun cukup besar rata-rata pertahunnya. Lalu tanaman konservasi yang ditanam adalah *eucalyptus*, yang bibitnya dicari dan diperoleh di hutan. Begitu lengkap bahan-bahan agrikultur yang dibutuhkan disana. Selain itu, dalam perjalanan ke Sarimukti kita akan melihat beberapa tempat usaha pemandian air panas (kolam air panas, energi panas bumi) komersil. Ini membuat saya membatin bahwa semakin lengkap potensi yang dimiliki desa Sarimukti.

Sayangnya, sebagian besar tanah pertanian dan perkebunan yang ada di Sarimukti bukanlah milik mereka. Lahan tersebut kebanyakan milik orang lain, orang luar Sarimukti, yang memang tinggal di desa Sarimukti tetapi bukan orang dari desa Sarimukti asli. Sebenarnya orang-orang desa Sarimukti memiliki tanah, yang mereka sebut dengan ‘tanah waris’ (*Yufik*⁸, Sarimukti: 2011), yang terletak di tengah desa dan di kaki bukit (dekat dengan hutan), sekitar 20 menit berjalan dari balai desa. Permasalahannya adalah tanah waris ini tidak memiliki sertifikat. Secara historis, tidak ada orang desa Sarimukti yang mempunyai pengetahuan bagaimana cara membuat sertifikat. Beberapa cerita juga menunjukkan bahwa mereka –sedikit agak- tidak memperlmasalahkan atau tidak peduli bahwa ‘tanah waris’ mereka itu memiliki sertifikat atau tidak, karena secara fungsional mereka

⁷ Pernyataan saya kutip dari sebuah wawancara di surat kabar *Inilah Koran: Dari Bandung untuk Indonesia*, Edisi no 070 tahun II/2013, 21 Januari 2013: 13., atau dari www.issuu.com/inilahkoran2/docs/21_jan_13

⁸ Yufik adalah salah seorang pemuda penggerak (aktivis) pendidikan di SMK Pertanian Sarimukti, yang juga seorang guru non-formal di SMK Pertanian Sarimukti.

telah menggunakan tanah itu selama bertahun-tahun. Anggapan akan warisan, dalam kesadaran umum mereka, mempunyai identitas tak tertulis yang berkaitan dengan hukum lokal. Sistem zonasi mereka sudah diatur berdasarkan kesepakatan desa dan diakui seluruh orang-orang di Sarimukti.

Orang-orang tua yang ada di desa Sarimukti sebagian besar adalah buruh tani. Sebagian kecil dari mereka para generasi tua ini ada yang menjadi petani utuh (pemilik lahan pertanian atau perkebunan), tetapi dengan konformitas yang kecil. Ini adalah golongan yang bisa dikategorikan petani miskin/petani kecil. Berdasarkan cerita dan informasi, jika kita datang berkunjung ke desa Sarimukti sekitar lima sampai enam tahun lalu, kita akan banyak, dan hanya, menemukan orang-orang tua berkutat dengan pertanian. Saat itu, semua yang ‘menyentuh tanah’ adalah orang tua. Mengapa generasi tua? Karena memang di Sarimukti generasi tua-lah yang mampu mengolah pertanian atau menjadi buruh di pertanian atau perkebunan (Yufik, Sarimukti: 2011). Lalu bagaimana dengan anak-anak mudanya?

Sebagian anak-anak muda dari Sarimukti ini melakukan migrasi keluar desa, ke kecamatan lain, ke kabupaten lain, atau bahkan ke kota-kota besar. Dorongan utama bagi mereka yang bermigrasi dari desa ke kota adalah untuk memperoleh penghasilan dan kehidupan yang lebih baik yang tidak bisa dibentuk di daerah asalnya (Manning, 1996: 13). Hal ini dilakukan demi pekerjaan; “daripada menganggur di desa..”, begitu kata mereka. Data yang ada juga menunjukkan sebagian besar anak-anak muda di desa Sarimukti tidak mengenyam sekolah tingkat menengah atas, bahkan yang mengenyam sekolah setingkat SMP pun sangat sedikit. Setelah lulus SD atau setelah SMP, biasanya si anak diminta membantu keluarganya (untuk bekerja atau berkegiatan apa saja) atau jika perempuan maka dia dinikahkan dini. Pada laki-laki, pekerjaan mereka sebagian besar menjadi tukang ojek (selanjutnya dapat saya sebut ‘ngojek’), tetapi banyak dari mereka terlihat tidak melakukan apa-apa atau hanya sekedar *nongkrong*. Saya mendapat jawaban dari beberapa anak muda bahwa ngojek ini bukanlah kegiatan yang disebut “mata pencaharian”, tetapi lebih kepada bagaimana mereka bisa mengisi waktu luang mereka dan tampak -berusaha- menghindari diri dari terlihat sebagai orang yang tidak melakukan apa-apa. Pertanyaan lain yang muncul adalah; dengan sumber daya alam sebesar itu kenapa masyarakat desa Sarimukti tergolong kekurangan dan tidak sejahtera? Milik siapa sebagian besar tanah di lahan agraria yang subur di desa tersebut?

Seperti yang sudah saya sebutkan diatas, sebagian besar lahan pertanian di Sarimukti adalah milik orang luar. Mereka adalah tuan-tuan tanah yang membeli banyak lahan pertanian di Sarimukti yang tidak bisa diolah secara maksimal oleh generasi tua mereka. Tak dapat dipungkiri bahwa kekayaan di desa Sarimukti

ini menarik investor dari luar untuk menginvestasikan modal ke desa, entah itu sebuah perusahaan, ataupun individu yang memiliki modal dalam strata yang mapan. Secara historis, ledakan investasi ini dimulai pada tahun 1935, ketika banyak tuan tanah dan pedagang-pedagang besar Indonesia menginvestasikan uang mereka dalam gelombang industri. Wertheim memaparkan, “dan yang terjadi kemudian, ketika industri-industri seperti ini mulai menunjukkan aspek vitalnya, orang-orang luar (termasuk Cina) mulai menunjukkan ketertarikannya” (dalam Robinson, 1986: 24).

Sebagai contoh, di desa Sarimukti ada sebuah pabrik yang berdiri di atas sebuah bukit disana. Pabrik tersebut adalah pabrik pembangkit listrik bertenaga panas bumi atau Geothermal. Cukup mengejutkan bahwa pabrik tersebut ternyata milik Chevron, salah satu perusahaan swasta penghasil energi terbesar di dunia. Di kondisi desa yang jauh dan cukup terpencil seperti itu, Chevron bisa datang serta mematri cakupannya di Sarimukti yang terlihat jauh dari perkembangan. Weber (1930) berpendapat bahwa kapitalisme modern –yang ditunjukkan lewat perusahaan bebas- dicirikan oleh tingkat rasionalitas yang tinggi untuk mereifikasi pola pikir masyarakat terhadap arus ekonomi era modern. Konteks ini menunjukkan bahwa perusahaan sebenarnya adalah organisasi totaliter yang efektif dan beroperasi dalam jalur non demokratis⁹.

Kemudian terkait dengan tanah waris, tanah mereka tersebut di klaim menjadi milik Perhutani semenjak kayu putih dan pohon jati masuk. Sebagian besar pemanfaatan komoditas ini memang berdiri diatas tanah waris orang-orang Sarimukti. Pernah ada yang memanfaatkan lahan (tanah waris) tersebut untuk diolah sebagai lahan kentang. Namun, orang asli Sarimukti tersebut dipermasalahkan dan dipenjara atas tuduhan penggunaan lahan Perhutani secara ilegal (*Yufik*, Sarimukti: 2011). Ternyata dalam sirkulasi kapital di desa-desa seperti ini pun negara ingin ikut ‘memiliki andil’. Kenneth Young menjelaskan pendapatnya tentang ambiguitas ini,

"Peran klasik dari pemerintah (negara) pada masyarakat kapitalis ideal adalah tidak adanya intervensi, diluar menjaga stabilitas produksi kepemilikan-pribadi kapitalis, kebebasan dalam kontrak perjanjian, pasar dan lain-lain. Tetapi kenyataannya berbeda. Pemerintah turut campur dalam perluasan atau pengurangan tingkat ekonomi kapitalis. Saat ini, pemerintah terlibat dalam kehidupan ekonomi masyarakat pedesaan di Jawa, khususnya aspek-aspek dimana sistem ekonomi desa menawarkan ruang terbaik atas akumulasi kapital, mereka mengambil peran disitu. Posisi pemerintah tersebut sangat menonjol dibanding investor dan subjek pengambil-keuntungan lainnya." (Tanter & Young, 1990: 148)

9 Menurut saya Weber kurang menjelaskan lebih lanjut dari teorinya diatas, bahwa sebenarnya fase teritorial dan ekonomikal ini bukanlah rasionalitas yang terbentuk secara mendadak, namun gejala yang muncul secara repetitif, seperti data yang ditunjukkan oleh Sarimukti.

Melucci memaparkan hal tersebut sebagai rasionalisasi dominan, yaitu bagaimana negara dan pasar merasionalisasi (mencari dalih) atas ruang privat, membangkitkan kelompok sosial baru dan tindakan kolektif yang menjelaskan ‘kebisuan dan elemen kesewenang-wenangan dari peraturan yang dominan’ dan ‘memperkenalkan kepada umum sebuah alternatif baru’ (Edelman, 2001: 289). Gegar konformitas tersebut, –mengutip ungkapan Husken- yang paling berat merasakan akibatnya adalah keluarga tunakisma yang semakin hilang kesempatan kerja dan penghasilannya dalam pertanian¹⁰, dan terjadi di Sarimukti.

Bait-bait cerita diatas menekankan pada satu hal; sistem privatisasi terhadap lahan. Jika mengacu pada konsep akumulasi primitif di pendekatan Marxian, proses penguasaan pribadi terhadap tanah adalah fase transformasi masyarakat feodal ke masyarakat kapitalis. Tetapi sebenarnya menurut Marx, akumulasi primitif terkait dengan kemajuan yang berdiri atas berubahnya bentuk perbudakan, yaitu transformasi dari eksploitasi feodal menjadi eksploitasi kapital (Marx, 1867/1887: 501). Tahapan ini didahului oleh pengambil-alihan aset-aset produksi dari para petani, dimana proses reformasi juga semakin mendorong terjadinya penjualan murah tanah-tanah luas kepada para spekulan, yang kemudian mengusir para pengolah tanah. Proses pengambil-alihan tersebut memunculkan suatu lapisan yang dinamakan proletariat dan yang sekarang kita kenal sebagai ‘buruh-upahan’ (buruh tani).

Pada fase neoliberal, petani tidak lagi berhadapan pada tuan tanah tetapi langsung dengan pemodal besar yang tidak lagi dihalangi oleh batas-batas konvensional suatu negara. Diterapkannya privatisasi atas lahan-lahan yang potensial untuk menyokong ekonomi-sosial pada komunitas, menyebabkan situasi yang abu-abu bagi masyarakat di Sarimukti¹¹. Privatisasi telah membuat sektor sumber daya alam bukan lagi dalam rangka untuk kesejahteraan bersama atau untuk memenuhi kebutuhan bersama, melainkan milik segelintir orang atau lapisan kelas sosial¹² tertentu. Ini tak lepas dari program modernisasi pertanian

10 Frans Husken juga menarik analisa bahwa kondisi ini terjadi pada panen-panen padi dan perkebunan sejak tahun 1978. Dan kelompok petani kayalah yang banyak mengambil keuntungan, terutama terkait program modernisasi dimana di dalamnya terhubung dengan fasilitas kredit dan lain-lain (*lih.* Husken, 1998: 272& 319).

11 Secara historis kondisi ini sudah meninggalkan jejaknya sejak paro pertama abad 19. Pada tahun 1860, negeri Belanda membuat kebijakan liberalisasi agraria di Hindia-Belanda (Jawa). Saat itu Garut pun mulai ditelanjangi tangan swasta, seperti masuknya Karl Frederick Holle yang membuka hutan waspada di kaki gunung Cikurai menjadi kebun teh (*lih.* artikel ‘zainulumukhtar/gin’. *Inilah Koran: Dari Bandung untuk Indonesia*, Edisi no 070 tahun II/2013, 21 Januari 2013: 11., atau di www.issuu.com/inilahkoran2/docs/21_jan_13)

12 Ada banyak perdebatan serta perluasan konsep yang menjelaskan tentang bagaimana ‘kelas sosial’ dirumuskan. Richard Miller menyatakan bahwa “tidak ada aturan yang prinsipnya bisa digunakan untuk mengelompokkan orang di dalam suatu masyarakat tanpa mempelajari interaksi-interaksi yang aktual di antara proses-proses ekonomi di satu sisi, dan antara proses politis dan kultural di sisi lain” (dalam Ritzer & Goodman, 2004: 58). Dalam buku *Capital vol. I*, Marx mengartikan kelas sebagai pengelompokan sosial yang terbentuk dari hubungan produksi utama

pada akhir tahun 1960-an dan berkembang tahun 1970-an (diprakarsai oleh pemerintah) yang telah memberikan akibat berbeda-beda pada berbagai lapisan penduduk di agraria di Jawa (Husken, 1998: 272), termasuk Garut.

Model seperti ini telah merangsek ke desa-desa sejak studi Clifford Geertz tentang pertanian di Jawa, yang dijelaskan lebih lanjut oleh Robinson (1986: 6): “mulai pertengahan abad ke-19, kehadiran ekonomi kolonial secara pesat telah merubah sistem perdagangan alami menjadi perusahaan kapitalis”. Berubahnya sistem ini, menurut Husken adalah pemicu berubahnya diferensiasi sosial yang ada pada masyarakat pedesaan di pulau Jawa. Satu yang terpenting adalah munculnya ‘tengkulak’ dan ‘mandor’. Sosok ini terlihat setelah masuknya modal secara besar-besaran dan introduksi teknologi pertanian baru ke desa-desa di pulau Jawa, yang menyebabkan perubahan struktur dalam produksi dan organisasi kerja (Husken, 1998: 239). Tengkulak ternyata sangat berperan besar dalam menentukan sirkulasi kapital serta proses agraria, yang mana pada dasarnya kepentingan tersebut adalah untuk dirinya sendiri dan elit desa. Husken memaparkan bahwa visibilitas tersebut terkait dengan peranan penting “tengkulak” dan “pemborong hasil pertanian” dalam proses produksi (tebasan) yang sudah terjadi pada masa kolonial.

Pada studi kasus di Sarimukti, subjek yang disebut tengkulak juga sebenarnya merangkap sebagai mandor. Tengkulak adalah sosok penting sebagai pemilik perusahaan pertanian dan perkebunan diatas lahan yang besar, atau bahkan dalam proliferasi pertukaran-pertukaran simbolik dan material yang terjadi di ranah publik. Tengkulak juga sebagai wakil dari pemodal besar yang berinvestasi di Sarimukti, dimana dirinya seperti pemilik lahan itu sendiri. Semua yang berkaitan dengan distribusi hasil lahan, dan perkembangan ekonomi (dalam hal uang dan bibit) semua diatur oleh tengkulak. Tatanan ekonomi yang terbentuk di desa tersebut mengharuskan, atau secara tidak langsung memaksa, wajibnya para petani desa memiliki interkoneksi dengan tengkulak. Ini adalah pergulatan eklektik yang bersifat ambigu bagi para generasi tua petani di Sarimukti. Ada beberapa alasan yang akan saya paparkan.

Pertama; tengkulak membawa tenaga kerja ahli yang mengerti –memiliki pengetahuan- bagaimana cara mengolah lahan. Ini adalah cara kuat menekan para petani kecil di Sarimukti dalam persaingan produktivitas, karena kurangnya

dalam masyarakat. Sedangkan dalam *Manifesto of the Communist Party*(1848/1888) Marx mengajukan ancaman dua kelas yang mahsyur, borjuis-proletar, dimana patokannya tidak pada sumber penghasilan, tapi pada hak milik atas sarana produksi dan nilai-lebih serta pada keikutsertaan dalam pergulatan politik (Mollona, De Neve & Parry, 2009: 399). Untuk konteks Sarimukti, saya mengacu pada apa yang didefinisikan E.P.Thompson tentang terminologi kelas: “...and class happens when some men, as a result of common experiences (inherited or shared) feel and articulate the identity of their interests as between themselves, and as against other men, whose interests are different from (and usually opposed to) theirs” (dalam Kalleberg & Berg, 1987: 68).

sumber daya manusia bagi petani kecil untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan perkebunan disana. Kedua; petani-petani Sarimukti sulit untuk mendistribusikannya keluar, dalam pengertian ‘tidak bisa langsung’ melempar ke arena pasar hasil produksi mereka tersebut. Ini dikarenakan sistem embargo tidak langsung dari tengkulak, dengan jaringan pasar yang dimilikinya dan proliferasi aturan-aturan tertentu yang bersifat superior. Sehingga, persaingan besar-besaran terjadi antara petani kaya dan petani kecil; masyarakat pedesaan bertransformasi menjadi petani kapitalis dan kaum proletar desa. Dari situ kita lihat bahwa tengkulak menguasai jalur pasar dengan modal simbolik¹³ yang dimilikinya sebagai aset kepercayaan bagi aktor-aktor pasar, menegaskan dirinya mengakses kelas sosial yang lebih tinggi lewat pasar. Gambaran tersebut bertolak belakang dari himne yang dikumandangkan ke benak kita tentang ekonomi yang kompetitif, rasional, efisien dan adil dalam ‘pasar’. Bagi Robinson (1986: 34), alasan utama atas hal ini adalah dominasi dari perusahaan perkebunan dalam komersialisasi hasil produksi, yang artinya pasar nyaris tidak pernah kompetitif. Dalam kapitalis modern seperti sekarang, arena publik (pasar) dialihkan kewenangan pengambilan keputusannya oleh kontrol pada tiran swasta dalam kenyataannya, dan meminimalkan peran negara (Chomsky, 2003: 130).

Ketiga; tengkulak inilah aktor yang esensial, dan sentral dari hampir semua sirkulasi ekonomi agraria yang ada. Konsep sentral yang dimiliki oleh tengkulak ini terlihat bagi saya juga sebagai ‘perantara’ (*middlemen*), yang bisa bergerak bebas dalam struktur dan menarik keuntungan dari sana. Cerita dari seorang bapak petani di pinggir *galangan* sawah pada suatu waktu menjelaskan bahwa, yang menjadi perantara masuknya investasi swasta ke Sarimukti adalah tengkulak dan segelintir elit desa dari golongan kelas atas. Aktor ini membuka ruang baru dimana posisi mereka sebagai perantara bisa bergerak bebas sebagai penghubung, pemilik, dan pengait. Dengan posisi tersebut dalam realisme sosial yang ada, tengkulak bagaikan representasi dari raja dalam konteks monopoli, senada dengan tafsir Geertz (1992: 35) tentang *theory of the exemplary center* (teori pusat yang patut dicontoh), yang tergambarkan sebagai sebuah mikrokosmos tatanan adikodrati dalam skala yang lebih kecil. Tengkulak tidak hanya merupakan mesin, inti, atau poros ekonomi pertanian di desa; tengkulak adalah ekonomi pertanian desa itu sendiri. Otoritas penuh dalam perputaran ekonomi pertanian dan perkebunan dimiliki oleh tengkulak tanpa memerlukan tindakan supresif. Ini

13 Pierre Bourdieu menjelaskan bahwa ada empat *capital* yang digambarkannya sebagai pembentuk kelas, yaitu modal ekonomi (*modal capital*) seperti tanah dan uang, modal sosial (*social capital*) yakni relasi dan kenalan, modal budaya (*cultural capital*) yakni cara berbicara, tatapan hingga cara mendengarkan, dan keempat modal simbolik (*symbolic capital*) seperti ijazah, nama besar keluarga dan kharisma (Bourdieu, 1984). Penggunaan dan penyerapan empat *capital* ini tercermin dalam pola “habitus”.

sesuai dengan tipe ‘otoritas legal’¹⁴, dilegitimasi oleh keyakinan formalistik pada supremasi hukum apa pun isi spesifiknya (Weber, 1947), yang membuat petani tunduk kepada sistem monopoli yang diberikan oleh tengkulak karena mereka tahu bahwa mereka tidak akan bisa hidup tanpa terlibat di lingkaran tersebut.

Dalam sistem ini kepatuhan tidak disebabkan oleh orang, melainkan oleh seperangkat prinsip impersonal. Asumsinya ialah bahwa aturan-aturan legal sengaja dibuat untuk memajukan pencapaian rasional atas tujuan-tujuan kolektif. Tengkulak membentuk aturan-aturan (seperti harga, perangkat penjualan, alur distribusi, penyediaan transportasi, menyediakan pasar, bibit dll) sebagai dasar prinsip yang ditanamkan ke masyarakat menjadi kesadaran baru. Hal ini menjadi sebuah keyakinan bagi petani yang ada di desa Sarimukti bahwa itulah sistem yang benar dan yang menghidupi, sebuah konstruksi hukum di alur ekonomi pertanian, dengan melegitimasi diri pada ‘tujuan kolektif’ kesejahteraan. Tengkulak memiliki otoritas dengan sistem miliknya—serta perangkat hukum kasat mata— yang dipatuhi dan aksiomatis, seakan-akan secara sah memonopoli penggunaan paksaan. Oleh karena itu tengkulak tidak lagi dilihat sebagai orang yang berkuasa atas sistem, tetapi dia adalah sistem itu sendiri.

Babak Baru: SMK Pertanian Sarimukti

SMK Pertanian Sarimukti¹⁵ didirikan pada tahun 2008 atas dasar inisiatif warga desa Sarimukti, yang juga didukung oleh Serikat Petani Pasundan (SPP). Oleh Nancy Peluso SPP disebut sebagai organisasi kaum petani terbesar di Jawa, yang sebenarnya sudah digerakkan secara ‘bawah tanah’ sejak pertengahan tahun 90-an tetapi baru formal didirikan pada tahun 2000 (dalam Saturnino, Edelman & Kay, 2008: 221). Berdirinya SMK Sarimukti ini juga adalah hasil gagasan dari beberapa orang yang peduli dengan perkembangan pendidikan yang adaptif di Sarimukti. Salah satunya adalah pak Yayan Supriatna (dikenal juga dengan

¹⁴ Saya melihat bahwa kecenderungan petani Sarimukti terikat dalam subordinasi yang dipegang oleh tengkulak bukanlah karena ada tindakan supresif dari tengkulak tersebut, lebih kepada sifat sukarela yang digarisbawahi oleh elemen-elemen tertentu secara simbolik. Weber mengungkapkan (dalam Wrong, 2003), bahwa kriteria fundamental dalam otoritas adalah “kepatuhan sukarela-minimal tertentu”, melibatkan kepatuhan sukarela tanpa syarat di pihak bawahan. Analogi ini seperti budak yang secara buta mematuhi majikan mereka meskipun majikannya tidak menggunakan cambuk, karena takut dia akan menggunakannya, tidak jauh berbeda dengan tentara yang mematuhi komandan mereka atau pejabat yang mematuhi atasan birokrasi mereka, karena mereka juga tahu bahwa atasan akan memberikan sanksi untuk menghukum mereka jika tidak patuh.

Tanpa adanya ancaman hukuman, akan ada hukuman yang otomatis terjadi—yang telah terancang hampir sempurna— di kemudian waktu. Ini membentuk kontrol terhadap relasi struktur baru tersebut. Untuk terlaksananya transformasi ini sebuah sistem keyakinan harus muncul yang secara sosial melegitimasi pelaksanaan kontrol.

¹⁵ Untuk hematnya, selanjutnya akan saya sebut ‘SMK Sarimukti’ saja (tanpa mengurangi makna).

nama mang Ade Jabok), seorang yang menjadi motor di SPP juga pernah menjabat sebagai lurah desa Sarimukti. Salah satu yang lain adalah pak Anas, yang pernah menjadi guru di Mts Sururon di Sarimukti (tingkat menengah pertama) dan akhirnya menjadi guru juga di SMK Sarimukti. Ceritera lain mengatakan bahwa Mts Sururon inilah yang menjadi cikal bakal SMK Sarimukti (pendapat dari seorang guru), yang kemudian –tanpa tebang pilih- di dirikan atas visi yang sama.

Tujuan utama SMK yang menyisipkan nama ‘Pertanian’ sebagai identitasnya ini adalah untuk menghasilkan siswa-siswa muda yang memiliki kemampuan dalam mengolah lahan pertanian, perkebunan, serta pengetahuan untuk mengelola sirkulasi ekonomi agraria di Sarimukti. Dengan begitu lulusan dari sekolah ini bisa memanfaatkan dan mengatur sumber daya agraria di desanya untuk kesejahteraan yang merata, dapat menghindari urbanisasi, serta menjadi generasi penerus orang-orang tua di desanya. Pada awalnya, pak Anas lah yang memperjuangkan SMK Sarimukti untuk mendapat pengakuan dan akreditasi agar bisa diakui seperti SMK yang lainnya. Kemudian apa yang dilakukan? Pak Anas berkonsolidasi dengan SMK Karang Pawitan (yang terletak jauh dari desa Sarimukti), untuk menstrukturisasi SMK Sarimukti sebagai sub-unit dari SMK Karang Pawitan. Ada dua alasan mengapa pak Anas memperjuangkan hal itu, pertama agar dapat diakui dan dilihat sebagai sebuah badan utuh yang dinamakan sekolah, kedua, untuk mendapatkan akreditasi.

SMK Sarimukti didirikan diatas sebuah tanah carik yang disumbangkan, yang di alokasikan untuk sekolah. Kebetulan pada waktu itu, sebelum bangunan SMK ini berdiri, ada sebuah bangunan bekas gudang jamur, yang akhirnya di pinta oleh anak-anak desa (calon-calon siswa pertama SMK Sarimukti) untuk di bongkar agar bahan-bahan materialnya seperti kayu, atap, dan lainnya bisa digunakan untuk membangun kelas. Pak Lurah (yang saat itu dijabat pak Yayan/mang Ade Jabok) pun setuju, dan beliau meminta izin kepada si *empunya* bangunan, yang akhirnya dibolehkan untuk pembongkaran. Setelah itu secara gotong-royong, calon siswa-siswi (pertama) SMK Sarimukti bersama dengan orang-orang tua mereka, membangun ruang kelas diatas tanah carik yang disediakan, dan berdirilah SMK Sarimukti sampai sekarang.

Jumlah siswa yang ada di SMK Sarimukti tidak banyak, satu angkatan rata-rata hanya sekitar 15 – 25 orang. Pada waktu riset untuk tulisan ini berlangsung, SMK Sarimukti sedang mendirikan Bale Baca, yang dalam tahap pembangunan secara swadaya dan dipimpin langsung oleh bapak Anas. Bale Baca ini akan difungsikan sebagai perpustakaan dan tempat membaca siswa. Dibangun dengan bentuk *bale-bale* (panggung) dengan bahan mayoritas bambu, nampak akan terlihat asri walaupun belum seratus persen jadi. Buku-buku yang terdapat di bale baca ini bukan hanya buku-buku tentang pertanian saja, buku pengetahuan

umum dan sastra juga ada. Tujuannya adalah tetap memberikan siswa-siswinya pelajaran umum dalam kurikulum mereka, sebagai gambaran mereka untuk melihat ilmu pengetahuan yang berkembang secara general, juga tentunya untuk mencapai ujian kelulusan (kesetaraan).

Proses belajar mengajar di SMK Sarimukti bersifat sangat terbuka, dengan ‘dua arah’¹⁶, dengan konsep kebebasan berpendapat yang menarik nalar anak-anak muridnya untuk mampu menganalisa permasalahan agraria serta perkebunan. Sistem pengajaran ini agak mirip dengan cara memfasilitasi, seperti dalam sebuah *workshop*; sang guru menjadi fasilitator dan murid-murid menjadi peserta. Misalnya, dalam belajar mereka menggunakan proses ‘berbincang-bincang’ sebagai metode untuk mengenalkan sebuah pengetahuan serta menarik respon akan pengetahuan tersebut, dan saat murid ingin bertanya mereka akan merasa lebih nyaman. Cara ini mempermudah mengetahui tingkat kedalaman siswa untuk memahami materi atau permasalahan.

Hasilnya? Siswa yang ada di SMK Sarimukti benar-benar memiliki kemampuan serta pengetahuan yang maksimal –secara teori dan praktek- tentang bagaimana mengembangkan lahan pertanian, perkebunan, juga memanfaatkan sumber daya alam lainnya untuk diolah (saya berani menyebut mereka benar-benar cekatan dan pandai). Mereka juga memiliki kemampuan dalam hal manajemen ekonomi atas hasil produksi. Misalnya, secara perlahan mengembangkan lahan pertanian mereka, bagaimana membentuk jaringan dengan pasar, serta mengorganisasikan cara terbaik untuk membentuk relasi dengan pasar agar dapat diakomodir secara bersama-sama.

Hal penting lainnya adalah mereka memiliki pengetahuan tentang kebijakan dalam memanfaatkan sumber daya alam, bagaimana agar keseimbangan alam itu terjaga dan sebagainya. Ini dapat dilihat dari metode yang –secara tidak langsung- diterapkan oleh SMK Sarimukti dimana siswanya dirangsang menjadi warga negara yang kritis dan aktif. Metode ini –meminjam istilah John Fien- disebut “*hidden curriculum*”, yaitu konsep memilah diri dengan berefleksi atas beberapa peran tertentu untuk mencapai ‘ketepatan’ di masa depan (Yencken, Fien & Sykes, 2000: 254-258). Konsep ini, meninjau berbagai posisi siswa terhadap lingkungan mereka jika mereka merefleksikan diri: *as a worker* (petani), *as a consumer*, *as a resident*, *as a leisure*, *as a learner*, atau *as a revolutioner*. Pemahaman siswa pun bangkit, kritis, dan memungkinkan mereka untuk mengeksplorasi setiap kemungkinan yang ada. Mereka bisa memilah mana yang baik atau tidak, efisien atau tidak, dan memilah kelebihan atau potensi kehancuran yang dimiliki desa

16 Pembelajaran baru terjadi jika ada komunikasi dua arah antara guru dan murid. Tetapi dewasa ini banyak Sekolah (yang guru-gurunya) tidak menerapkan esensi tersebut, hanya bersifat satu arah, guru memberikan, murid mendengar dan menghafal. Implementasi tersebut bukanlah “pembelajaran” dalam arti yang sebenar-benarnya.

mereka. Seorang murid dari SMK Sarimukti yang bernama Riswan berkata,

“sebenarnya sih kalau dibilang lebih memilih, tidak.. karena, semua orang tahulah, kalau pertanian, pasti ujung-ujungnya ke gunung lagi. Tapi ketika saya terjun langsung, misalnya ikut praktek di sekolah ini, ternyata bertani itu memang mengasyikan, dan itu menurut saya luar biasa..”

Pada praktiknya siswa-siswa ini menunjukkan minat yang berbeda dalam pertanian atau perkebunan, dan masing-masing mempunyai ‘kelebihan’ dalam bidangnya. Ada yang cenderung hebat dalam mengolah tanah dan merawat, ada yang mempunyai kemampuan sangat cekatan jika disuruh menanam dan memilih bibit, sampai panen. Ada pula yang lebih tertarik pada manajemen pengolahan panen sampai penjualan atau semacamnya (manajemen pasar). Menakjubkan lagi, seorang ibu bercerita kepada saya bahwa SMK Sarimukti ini gratis untuk orang-orang yang mau belajar. Biaya operasional dan lain-lain adalah murni swadaya masyarakat dan sumbangan. Sejauh ini pula, guru-guru di SMK Sarimukti juga tidak memaksa bagaimana jalur hidup yang harus diambil siswanya setelah mereka lulus dari sekolah.

Dijalankannya metode tersebut, yang notabene berbeda dengan sistem sekolah yang biasa, membuat perubahan besar pada minat pemuda disana untuk belajar. Mereka di-konstelasikan secara emosional bahwa sekolah itu adalah ruang bermain dan eksplorasi terhadap cara-cara hidup, yang jika mengutip ungkapan Fien, sekolah adalah ruang untuk menemukan ‘hidup’, memperoleh kesenangan, dan untuk memiliki ilmu sepanjang masa¹⁷. Metode yang dijalankan SMK Sarimukti adalah bentuk negasi atau *counter act* dari teori Foucault (1979) tentang disiplinisasi tubuh, yaitu terkait dengan sistem waktu yang merupakan disiplinisasi warisan kolonial¹⁸;

Time penetrates the body and with it all the meticulous controls of power... it imposes the best relation between a gesture and the overall position of the body, which is its condition of efficiency and speed (Foucault, 1979: 152 - 153).

Konsep Foucault tersebut diterapkan di banyak sistem pendidikan umum saat ini, yang mana hal itu sebenarnya adalah potensi untuk mempertegas supesifitas struktur¹⁹ (direpresentasikan dengan sistem pengajaran satu arah: guru memberi, murid menerima – guru adalah dewa).

17 Lih. John Fien, *Listening to the Voice of Youth: Implications for Educational Reform*. 2000: 257.

18 Prof.P.M. Laksono pernah menyebutkan dalam tulisannya, bahwa “kebiasaan *jam karet* (Lombard 1996) adalah praktik perlawanan akan disiplin tepat waktu pada budaya industrial Barat” (Laksono, P.M., 2000. *Permainan Tafsir: Politik Makna di Jalan pada Penghujung Orde Baru*).

19 Metode SMK Pertanian Sarimukti adalah lawan dari praktik pendidikan pasif yang umumnya diterapkan di sekolah-sekolah modern sekarang ini. Freire (1986) menganggap bahwa pendidikan pasif pada dasarnya adalah melanggengkan sistem ‘relasi penindasan’.

Sekolah adalah ranah eklektis untuk membentuk daya hidup seluas-luasnya dari apa yang di dapat, bukan sebagai kontrol untuk seragamisasi model manusia demi lahirnya pasukan baru dibawah supremasi tertentu. Supremasi tersebut terkait dengan membentuk individu modern –atas ideologi negara- dalam industrialisasi dan modernisasi (di aspek ekonomi pedesaan maupun perkotaan). Jika sekolah selalu dengan cara yang umum hal tersebut pasti mengarah pada pembentukan pasukan tenaga kerja pendukung sistem kapitalis (penjelasan Marx atas risetnya tahun 1844 di Inggris), dimana kapitalis membutuhkan efisiensi dan disiplin dalam rangka mempertahankan keberlangsungan produksi dan memaksimalkan fungsi mesin industri (Turner, 2008: 70). Kita dapat lihat, yang terjadi adalah keberlanjutan homogenisasi pasukan baru. Anak-anak dalam sekolah umum ini menjadi tenaga kerja potensial di dalamnya, dan segera setelah itu menjadi bagian dari industri di kota dengan skill yang mereka punya dalam kerangka yang homogen, dimana homogenisasi adalah alasan utama akan mata rantai kelemahan bagi keahlian dan tahapan buruh (Thompson, 1983/1989: 119)²⁰. Oleh karena itu saya melihat bahwa visi SMK Sarimukti ini juga satu wacana aktif yang bukan sekedar gagasan utopis untuk mengurangi ledakan “tentara cadangan”²¹ (seperti yang di analisa Marx, 1867/1887: 235, 244-245., 1844/1959: 47). Tak pelak bahwa wacana yang dibawa SMK Sarimukti mengurai segregasi nyata antara wacana sentralistik industri pada tubuh SMK umum²² dengan proyeksi realita bahwa konsep SMK umum adalah *deskilling* bagi alur ekonomi lokal (seperti di pedesaan atau di pesisir). Untuk ini Riswan kembali mengemukakan pendapatnya,

“..ya memang itu sih sebenarnya. Menurut saya, memang kita itu harus ngembangin (mengembangkan) pertanian, karena tanah kita itu berasal dari pertanian. Kita memang yang harus belajar, sama harus bisa buat ngebangun dari apa yang kita punya..”

20 Homogenisasi ini dibentuk dari metode disiplin sebagai teknologi politis terhadap tubuh yang ternyata dicerminkan oleh sistem sekolah modern dengan tujuan untuk membentuk individu-individu yang berguna bagi industri modern. Foucault menyimpulkan untuk mencapai hal itu disiplin menjalankan empat teknik, yakni: memberikan jadwal, mengatur gerakan, mengajukan latihan, dan menyusun ‘taktik’ untuk menghasilkan kombinasi kekuatan (Foucault, 1979: 167). Hal tersebut menunjukkan bahwa kontrol dari aturan waktu seperti yang disebut diatas mematkan kontrak relasi secara kultural dan emosional dan mengedepankan sistem tubuh manusia untuk efisiensi produksi.

21 Istilah “tentara cadangan” ini adalah konsep yang diberikan Marx ketika dia melihat adanya cadangan buruh penganggur dalam jumlah besar yang –terpaksa- mau dibayar murah untuk melakukan pekerjaan industri. Hal tersebut adalah strategi dari para kapitalis dengan mengkonstruksi kerangka pemaksaan industri antara pembatasan kesempatan kerja dengan kapasitas mesin industri. Degradasi ini memicu kondisi ‘teralienasi’, yang melahirkan banyak orang menjadi sempit ruang kesempatan di bagian-bagian roda industri.

22 Konsep SMK pada umumnya dianggap sebagai *up-skilling* di era modernisasi dalam sudut pandang ‘pemerintah pusat’.

Kemudian ia menegaskan,

“..sekarang kalau misalkan sekolah (SMK umum), misalkan mengambil (jurusan) otomotif, otomatis kalau *enggak* mempunyai biaya, kita harus pergi ke kota. Untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan jurusan kita..”

Kata-kata tersebut, paling tidak, menunjukkan bahwa Sarimukti telah mampu menanamkan kesadaran pada siswa-siswinya atas apa yang sebenarnya mereka butuhkan atau apa yang harus mereka lakukan.

Munculnya SMK Sarimukti memberi beberapa perubahan besar yang terjadi di desa tersebut, yaitu,

1. Petani yang ada di Sarimukti sekarang bukan hanya generasi tua saja, tetapi banyak anak muda yang sudah turun ke aspek agraria, yang berarti proses regenerasi telah berhasil. Anak-anak muda ini sebagian besar siswa atau lulusan SMK Sarimukti.
2. Dengan serentak dan bersama-sama, anak-anak muda ini (dengan dibantu oleh orang-orang tuanya) membangun jaringan atau akses terhadap pasar secara mandiri. Ini membuat mereka tidak bergantung lagi kepada tengkulak atas sirkulasi hasil pertanian dan perkebunan mereka. Mereka juga berani membangun jaringan dengan petani-petani dari luar desa mereka
3. Petani kecil di desa Sarimukti sekarang mampu untuk bersaing dengan pemodal dan petani kaya yang bukan orang Sarimukti. Mereka juga mampu bersaing dengan perusahaan pertanian milik tengkulak, dengan dukungan sumber dari daya manusia yang dihasilkan SMK Sarimukti yang memadai untuk menopang tahap tersebut.
4. Perlahan-lahan tingkat ekonomi rata-rata warga desa mulai beranjak naik (walaupun tentu saja tidak semua). Ini didukung oleh meningkatnya tingkat produktivitas produksi mereka terhadap pertanian dan perkebunan. Perlahan-lahan, banyak petani yang sedikit demi sedikit membeli tanah yang dulu tidak bisa mereka *garap*, atau yang mereka jual.
5. Semakin banyak anak muda yang menyadari bahwa sekolah seharusnya bisa memberikan mereka bekal untuk menghadapi potensi dan kesulitan-kesulitan dalam ranah lokal. Hal ini membuat SMK Sarimukti semakin diminati, dengan berkaca pada hasil dari tujuan diberikannya pengetahuan dan sistem yang berbeda di sekolah ini.

Apa yang diberikan di SMK Sarimukti telah terpenuhi, termasuk dalam aspek ideologis, yaitu ilmu untuk membangun kesejahteraan berbasis pertanian, dimanapun hal tersebut diterapkan. Itulah hal yang terpenting. Sampai saat ini, tidak ada siswa lulusan SMK Sarimukti meninggalkan desanya untuk mencari

penghidupan baru. Mereka serius untuk memperbaiki kesejahteraan di bidang perkebunan dan pertanian Sarimukti serta sistem-sistemnya, dengan kekuatan baru yang dilandaskan atas pengembangan bersama.

Gerakan Resistensial: *Hidden Transcript* dalam Selimut Pendidikan

Mari kita masuk ke ranah kontemplatif dimana terdapat pergelutan antara tubuh SMK Pertanian Sarimukti, neoliberalisme, sistem pendidikan serta privatisasi lahan yang terjadi disana. Hal-hal tersebut merupakan suatu interkoneksi yang saya lihat sebagai paradoks serta non-paradoks.

SMK Pertanian Sarimukti adalah sebuah lembaga yang lahir atas ide segelintir orang, dan sebenarnya termanifestasikan menjadi sebuah gerakan. Gerakan ini tentu saja resistensial terhadap kerangka neoliberalisme yang ada di desa tersebut. Gerakan SMK Sarimukti ini memiliki dua sisi; pertama, adalah kesadaran bahwa hal tersebut adalah solusi aktif, atau kedua, sebagai transgresi (penyimpangan) dari tatanan yang dianggap positif.

James Scott mengisyaratkan bahwa gerakan-gerakan pedesaan ditakdirkan untuk terus bersifat lokal dan terpecah-pecah, menonjolkan ‘bentuk-bentuk pembangkangan awam keseharian’ dan menghindari konfrontasi terbuka dengan negara atau kelas-kelas yang lebih kaya (Scott, 1985). Saya tidak setuju atas analisa James Scott tersebut, di balik sebuah ke-setujuan saya akan satu konsep dari paparan beliau diatas. Pertama, saya setuju bahwa gerakan-gerakan pedesaan terkadang bersifat lokal dan terpecah-pecah. Kenyataan ini terlihat bahwa gerakan pendidikan SMK Sarimukti sebagai ‘jalan keluar’ yang berlawanan dari adaptisasi sistem neoliberal di Sarimukti, memiliki dualisme ideologis yang menekankan pada pembedaan tafsir ke orang-orang desa. Sebagian besar orang-orang desa mendukung, namun ada yang menolak serta berstigma negatif²³. Jadi konsep kesadaran tidak dapat terserap seluruhnya, dan gerakan ini hanya ada di Sarimukti (bersifat lokal).

Kedua, saya tidak setuju bahwa gerakan hanya menonjolkan bentuk pembangkangan awam keseharian. Rekonstruksi yang dilakukan orang-orang di dalam sebuah tubuh bernama SMK Sarimukti ini adalah *act*, yang hasilnya memotong regularitas sirkulasi ekonomi serta cara hidup yang ada di desa tersebut, dimana hal tersebut tidak terjadi dalam keseharian. Kita bisa menyebut hal ini pemberontakan dalam tubuh yang halus dengan tahapan-tahapan tertentu.

²³ Terdapat sedikit orang-orang tua di Sarimukti yang masih berpikiran bahwa SMK Sarimukti adalah SMK yang menyimpang, aneh dan tidak umum. Kritik tersebut juga dalam aspek cara mengajar (metode) yang dipunya SMK Sarimukti tersebut. Bagi beberapa orang tua tersebut gambaran tentang SMK yang biasa mereka tahu adalah SMK yang umum seperti yang ditemukan di kabupaten, atau seperti SMK Pasirwangi, dimana kurikulum sekolah berpegang pada spesialisasi jurusan otomotif, mesin industri, atau akuntansi.

Gluckman (dalam Claessen, 1987: 18) berkata bahwa pemberontakan (*rituals of rebellion*) terdapat di seluruh dunia dalam bentuk yang berbeda-beda. Aspek ini juga merujuk pada prinsip “loyalitas berlawanan” (*conflicting loyalties*). Loyalitas berlawanan terkait dengan hal ketiga, yaitu beberapa gerakan muncul dengan ‘tidak menghindarkan diri dari konfrontasi terbuka’, tetapi adakalanya dalam waktu bersamaan ‘sekaligus menghindarkan diri dari konfrontasi terbuka’ dalam aspek yang lain. Misalnya aspek ideologis atau pada praktik kerja. Loyalitas yang dimiliki oleh suatu kelas tertentu secara substantif dapat mengalami gejolak dan perpindahan alur, yang koheren dengan ‘wacana serta akses sokongan hidup yang bisa mempengaruhi pemikiran mereka’. Sehingga, otoritas menemui benturan dan ‘kepatuhan sukarela’ menjadi berubah.

Paul Willis (1990) dalam analisisnya mengemukakan bagaimana budaya resistensi mendekonstruksi dan merakit kembali budaya hegemoni. Dari sudut pandang Marxis ortodoks, resistensi budaya ini dapat dilihat sebagai tindakan menyokong (*holding action*). Ketimpangan yang terjadi di Sarimukti bukanlah sebuah konklusi ekonomi semata dan juga bukan sebuah konformitas bentuk sosial, tetapi juga membangkitkan bentuk budaya hegemoni. Satu hal yang mesti diperhatikan, secara substansial, resistensi sejatinya tidak semudah itu terbangun dari pertukaran, pemberian material ataupun penghisapan material, tetapi dari pola-pola “penghinaan” personal yang terciptanya dalam eksploitasi tersebut (Scott, 1990: 111). Jadi orang-orang pun sejatinya sudah ‘muak’ dalam posisi terhinakan di tanah mereka sendiri, yang tertekan dalam dominasi (hilangnya rasa merdeka).

Alasan tersebut termasuk faktor yang kuat di luar simpulan atas tindakan ekonomik. Sehingga, SMK Sarimukti seakan menjadi jawaban untuk menghadirkan bentuk budaya baru, yang akan merakit suatu bentuk budaya hegemoni dalam dialektika hegemonial, dan akan menarik orang-orang dari posisi terhinakan. Ini adalah pertemuan antara kontradiksi-kontradiksi, dimana usaha untuk memecahkan kontradiksi-kontradiksi ini adalah esensi yang dibangun atas realitas, dan akan menumbuhkan kontradiksi-kontradiksi baru yang ditanggulangi hanya dengan perubahan sosial yang nyata (Marx, 1867/1887: 119-121). Apa yang dilakukan oleh SMK Sarimukti adalah untuk menyokong proses kooptasi dalam rangka menanggulangi kontradiksi tersebut, kontradiksi dalam roda ekonomi berbasis-tanah mereka.

Resistensi, sekurangnya ditemukan dalam bentuk protes terbuka, petisi-petisi, kerusuhan, dan revolusi yang adakalanya meledak tetapi juga adakalanya lebih dalam ‘diam’ namun dengan pola pengelakan yang besar-besaran (Scott, 1990: 195). Mengacu pada Scott, berbagai bentuk resistensi bisa dikelompokkan menjadi dua kategori, yakni *public transcript* dan *hidden transcript*. *Public Transcript* adalah bentuk yang terbuka/ eksplisit dari resistensi itu, misalnya

terlihat dalam berbagai pertunjukan di atas pentas yang diibaratkan pemain teater yang harus hidup di dua dunia, yakni dunia nyata sehari-hari dan dunia “berpura-pura diatas panggung”. Sedangkan *hidden transcript* adalah bentuk resistensi yang dilakukan tersembunyi atau lebih tepatnya ‘di belakang’: pelaku resistensi berpura-pura bersikap baik di depan lawannya tetapi di belakang (ketika sedang berkumpul dengan teman yang satu pemikiran) mereka membicarakan lawannya itu, dengan menggosip, memfitnah, mengumpat, dan sebagainya.

Di cerita saya tentang SMK Sarimukti, tidak ada sifat perlawanan yang sesungguhnya sebagaimana diajarkan oleh organisasi modern Leninisme dan demokrasi kapitalis. Perlawanan mereka berada di luar kedua mainstream itu dan tetap berbasis pada analisis kelas untuk melihat persoalan ketimpangan serta penindasan yang terjadi. Resistensi, layaknya dominasi, selalu dalam posisi pertempuran antara dua bidang/ kubu (Scott, 1990: 188), dan ini terefleksikan di Sarimukti: antara siswa-siswa lulusan SMK Sarimukti dengan tengkulak; antara guru-guru (serta komunitas penggagas SMK Sarimukti) dengan pemilik modal dan elit desa; dan antara tubuh SMK Sarimukti dengan tubuh perusahaan swasta di desa Sarimukti.

Identifikasi terhadap persoalan ini berlangsung dalam suatu proses dialektika antara identitas kelas dan kesadaran kelas dalam suatu perjuangan kelas antara kelas-kelas subordinat dan kelas-kelas dominan di desa Sarimukti tersebut. Kita dapat menarik benang merahnya, bahwa perlawanan berlangsung dalam suatu hubungan subordinasi dan dominasi. Perlawanan terjadi dari kelas rendah atau yang disubordinasi, terhadap kelas atasan atau yang mendominasi. Titik pertentangan kepentingan kelas diidentifikasi sebagai suatu pengambilalihan surplus oleh kelas atas dari “hak” kelas bawah, dengan dalih menguasai alat produksi dan kekuasaan politik. Dengan demikian, perlawanan berlangsung dalam suatu hubungan dominasi dan subordinasi yang timpang, seperti pengambilalihan surplus dan manipulasi kekuasaan, baik dalam bentuk politik, ekonomi, maupun simbol-simbol budaya. Jadi orang-orang desa, martir-martir pendiri SMK Sarimukti, dan penggerak ekonomi desa yang dalam posisi ter-subordinasi, melakukan perlawanan melalui SMK Sarimukti sebagai sebuah gerakan resistensi baru dalam tubuh pendidikan.

Penekanannya, yang dilakukan oleh SMK Sarimukti dan apa yang dihasilkan olehnya bukanlah sebuah aksi turun ke jalan, demonstrasi, atau memproduksi individu-individu yang mau melakukan kerusuhan sebagai tanda perlawanan. Praktiknya adalah melalui ‘bentuk gugatan’ dengan ‘wajah tersembunyi’, yaitu apa yang disebut Scott sebagai resistensi *hidden transcript*. Scott memetaforakannya dalam ungkapan,

..that the hidden transcript is continually pressing against the limit of

what is permitted on stage, much as a body of water might press against a dam (Scott, 1990: 196).

Namun, bertolak dari dasar-dasar di kondisi Sarimukti, saya melihat ada gejala baru dari *hidden transcript* yang batas-batasnya tidak seperti dijelaskan oleh Scott. Bentuk dari *hidden transcript* bukan hanya dibatasi pada tingkat yang tertata (yang diizinkan) serta dalam kondisi pasif (mengumpat, menolak di belakang, dsb) yang suatu saat bisa jadi akan pecah terbuka menjadi *public transcript*²⁴. Gejala dan unsur praktik perlawanan dari SMK Sarimukti ini adalah pergerakan lewat pemahaman yang imanen serta memproduksi individu-individu yang bergerak aktif untuk melakukan perlawanan lewat elemen-elemen pengetahuan dan ‘praktik kerja’ (manifestasi mereka dalam bergerak kolektif mengolah agraria dan mengontrol balik sirkulasi ekonomi agraria). Secara bersamaan mereka tetap tidak melakukan konfrontasi terbuka atas apa yang tidak disetujuinya akan eksistensi dari lawannya, atau atas sistem yang diterapkan oleh lawannya. Bagi saya hal tersebut seperti ‘rekonsiliasi kepada cara yang berbeda dengan tipe pergerakan sama’ dan ‘dengan tujuan yang berbeda’ pula dengan aktor-aktor serta subjek neoliberalisme di desa Sarimukti.

Tilly mengatakan, bentuk-bentuk baru akan gugatan kolektif muncul untuk merespon pergeseran geografis dalam kekuasaan politik dan modal (artikel *Missingham*, dalam Fauzi, 2005: 206). Bentuk-bentuknya tidak lagi ditujukan pada pemegang kekuasaan lokal dan parokial, tetapi yang dibutuhkan adalah untuk membidik organ-organ kapitalisme industri. Pembebasan yang dilakukan oleh segelintir orang atau komunitas tersebut, tidak terletak pada revolusi sosial melawan para elite yang mendominasi struktur-struktur ekonomi dan politik, melainkan di dalam tantangan yang berhasil melawan kekuasaan atas wacana-wacana dan interaksi-interaksi yang terjadi dalam masyarakat (Foucault, 1979).

Berdirinya SMK Sarimukti sejatinya menemukan wujud sebagai gerakan resistensi, dengan bentuk tertentu (yang bisa saya sebut agak eksperimental). Bentuk-bentuk resistensi akan tetap ada selama dominasi itu masih berkuasa. Jika tidak dengan gaya resistensi yang lebih terbuka dan demokratis (prosedural), maka terjadi dengan bentuk yang “lain” yang bersifat cerminan, reflektif, dan tindakan simbolis baru sebagai transformasi dari gaya resistensi sebelumnya.

Geliat Politik Kelas Menengah: “Kesadaran” dan Tandingan

Mengacu pada analisis marxis tentang perluasan pasar berkelanjutan:

²⁴ Jika perlawanan yang terjadi dalam bentuk *public transcript*, ranah yang terlibat –kebanyakan- bukan hanya dalam wilayah ekonomi saja, tapi juga ke wilayah kekuasaan politik. Bentuk ini cenderung menimbulkan *friksi* yang dapat dirasakan bersama dan membawa akibat perubahan terhadap sikap dan perilaku politik, bahkan perilaku kekerasan., *lih.* Scott, 1990: 46-61.

penetrasi modal ke dalam ekonomi subsistensi dan semi-feodal, serta globalisasi pasar budaya dan modal, dalam struktur global melahirkan sejumlah gerakan berciri kesadaran kelas (*class consciousness movement*) (Mirsal, 2004). Kesadaran seperti itu terbentuk atas keinginan sekelompok orang untuk membuat perubahan dan mengkooptasi akses elementer dari kelas yang lebih tinggi, serta hasrat manusia untuk selalu berjuang dalam meraih posisi, pengaruh dan kekuasaan yang lebih tinggi. Sekelompok orang yang menggagas terbentuknya SMK Sarimukti ini adalah orang-orang yang sebenarnya bukan berasal dari kelompok/kelas bawah (saya menyebut bahwa guru di SMK itu juga termasuk), namun mempunyai kecenderungan ‘memposisikan diri’ sebagai kelas bawah dalam memandang ketimpangan yang terjadi di desa Sarimukti. Orang-orang tersebut (termasuk juga pak Yayan) adalah dari kelompok kelas menengah (*middle class*).

Geliat kontestasi di desa Sarimukti tergambarkan dengan munculnya dua kelompok dari kategori kelas menengah yang sama-sama memiliki tujuan dan kepentingan atas kondisi ekonomi desa tersebut, dan menjadi subjek utama di tulisan ini. Dua subjek ini bertentangan secara prinsip dan pergerakan. Pertama adalah penggagas SMK Pertanian Sarimukti, dan kedua adalah tengkulak. Menurut Wright (1985, dalam Tanter & Young, 1990: 154), secara konservatif kelas menengah di sebagian besar masyarakat dihubungkan dengan tingkat kesadaran dimana untuk mendapatkan keuntungan mereka menambatkan diri kepada kekuasaan –atau tatanan- yang ada (dan sebuah kesadaran akan ‘peralihan yang seperti apapun juga’). Tengkulak dapat berperan sebagai aktor yang mengkooptasi status dari kelas dominan sekaligus rekonsiliasi peran dengan kelas bawah, menegaskan kategori bahwa dirinya sebagai kelas menengah (*middle class*). Tengkulak juga subjek yang bergerak dengan persoalan menciptakan ruang antara negara dan masyarakat (ibid. 153), dan mengkonformitaskan langkah untuk mencoba berafiliasi dengan kelas dominan (Bourdieu, 1984: 251-254).

Perspektif dan gejala dari dua kelas menengah yang ber-oposisi ini berbeda dari apa yang didefinisikan Wright. Pertama, tengkulak adalah subjek yang komprehensif dengan definisi bahwa kelas menengah Indonesia memiliki tingkat ketergantungan kepada sebuah tatanan sosial yang mana di dalamnya terdiri atas birokrat-politik dan orang-orang militer yang menggenggam posisi dominan atas masyarakat dan ekonomi. Lalu yang kedua memiliki entitas makna yang berbeda dari sebelumnya. Kelas menengah Indonesia juga ada yang mengidentifikasi diri dalam usaha untuk tidak melibatkan dirinya, berada di luar, dan independen, dari kuatnya ikatan negara-sentris atas elit desa, pemilik tanah (yang kaya raya), dan para kapitalis desa (Tanter & Young, 1990: 159-160), dan ini saya asosiasikan ke para penggagas SMK Sarimukti.

Satu pihak dengan motivasi menyerap perekonomian dan kontrol

pembaharuan. Sedangkan yang lain dengan keprihatinan atas ketidak-adilan alur perekonomian, serta memproduksi manusia-manusia berkemampuan dan berpendidikan sebagai manifestasi gerakan mereka. Kedua subjek kelas menengah ini memiliki dasar kemampuan yang membuat mereka bisa melakukan perubahan dan melaksanakan tujuan mereka masing-masing. Mari kita lihat satu ungkapan dari William R.Liddle:

"Di Indonesia, pendidikan memiliki aspek signifikansi sosial yang besar, dan itu adalah kunci untuk masuk dalam beberapa kedudukan kelas menengah." (1985, *ibid.* 154)

Ungkapan tersebut menjadi dasar bahwa sebenarnya kelompok kelas menengah tersebut dikonstelasi dari sosok-sosok intelektual. Sejatinya pun setiap pergerakan yang ada dari kelas bawah itu dirangsang dari kaum kelas menengah seperti ini, entah itu berupa internalisasi sokongan material, ataupun introduksi ideologi.

Pada intinya, kedua subjek utama kelas menengah yang menjadi perdebatan di bagian ini sama-sama memiliki dasar "pendidikan". Tengkulak membawa pengetahuan yang dimiliki olehnya dalam hal ekonomi pasar, membawa tenaga kerja dari luar desa yang berpengalaman, serta manajemen alat produksi bidang agraria. Semua dalam rangka mengakomodir eksploitasi lahan dengan efektif dan efisien. Sedangkan penggagas dari SMK Pertanian Sarimukti yang pertama adalah aktivis berpendidikan, dimana sensibilitas mereka dalam ketimpangan sosial sangat terasah. Lalu penggagas yang kedua adalah pemilik bekal sebagai guru, yang bisa menganalisa keseluruhan potensi-potensi yang ada (SDA dan SDM di desa Sarimukti), serta mampu memberi rangsangan pada kesadaran masyarakat untuk bergerak.

Munculnya SMK Pertanian Sarimukti ini menjadi satu tanda pertempuran dua kelas menengah dengan tendensi 'merekonstruksi dan mengobjektifikasi' desa, yang bisa kita lihat kemana arahnya. Dua-duanya menjadi pemicu bagi konstruksi sosial, yang dibentuk dengan analisa dan perencanaan. Basis dukungan bagi mobilisasi sebuah gerakan tidak tersedia secara 'alamiah' dan otomatis; sebaliknya, basis itu dari dirinya sendiri merupakan sebuah konstruksi sosial (*social construct*) (Foucault, 1973). Basis dukungan bisa saja mengarahkan sebuah gerakan menjadi agen bagi kelompok-kelompok yang merasakan adanya tegangan struktural (*structural strain*), namun gerakan juga menciptakan basis dukungan bagi dirinya sendiri. Gerak kelas menengah itu pun bagi saya memiliki ciri subversif-nya sendiri-sendiri, juga bersifat impersonal,serta dengan bentuk yang tidak umum dan imanen, bagaimanapun masing-masing tujuannya. Konflik antar kelas tidak lagi dialami dan terungkap secara langsung sebagai perjuangan-perjuangan di kawasan produksi antara kaum pekerja dan kaum pemilik modal. Sebaliknya, konflik-konflik ini "muncul dalam bentuk-bentuk yang lebih terpencair

dan kurang kasat mata di dalam berbagai *setting* kelembagaan lain” (Garner, 1977).

Sebagai penutup, sejarah membuktikan bahwa nilai liberal dalam demokrasi, kekuasaan hukum dan kebebasan berbicara atau berpendapat, nampak secara tegas diakibatkan oleh intelektual dan profesional lapisan (strata) menengah (Tanter & Young, 1990: 67). Dari situ pembaca dapat melihat sendiri diskursus dari kelas menengah; ‘nilai liberal’ dan ‘kebebasan berpendapat’ yang tersimulasikan oleh pergulatan kelas menengah di desa Sarimukti.

Kesimpulan

Dalam tulisan ini saya hanya ingin menunjukkan, berdirinya SMK Pertanian Sarimukti bukanlah sekedar permasalahan pendidikan belaka. Berdirinya SMK Pertanian Sarimukti bukan sebuah program pemerintah, bukan pula program LSM, terkait dengan ‘membangun sekolah bermutu’ di daerah transisi. Secara genesis, SMK Pertanian Sarimukti adalah gugatan terhadap cara pendidikan Indonesia yang tidak bisa mengakomodasi individu-individu pada taraf lokal untuk mampu bersaing dan membangkitkan kesejahteraan hidup daerahnya sendiri. Transferensi sintesa pun berhasil diurai, bahwa SMK Pertanian Sarimukti lahir sebagai hasil dari kemuakan kelas menengah di desa Sarimukti akan hegemoni politik neoliberalisme di Sarimukti, serta atas kepedulian kepada para petani (orang-orang desa) yang kalah. Kekuasaan terselubung yang ada di Sarimukti, membangkitkan kekuatan lain yang bergerak dalam tubuh pendidikan. Penggambaran tersebut layaknya apa yang menjadi bagan besar kerangka kerja Michel Foucault dalam risetnya;

where there is power, there is resistance, and yet, or rather consequently, this resistance is never in a position of exteriority in relation to power. (Foucault, 1980: 73)

Saya setuju dengan pendapat Freire (2000), bahwa pendidikan merupakan sebuah *pilot project* dan agen untuk melakukan perubahan sosial guna membentuk masyarakat baru. Apa yang saya jelaskan dalam bait-bait kata di atas merujuk ke sebuah permasalahan, bahwa sekolah (sebagai ruang bernaungnya pendidikan) seharusnya merekonstruksi ‘ide dan tubuhnya’ agar bisa memberi pengetahuan dan kemampuan bagi siswa di suatu daerah demi menjawab persoalan-persoalan di komunitasnya tersebut. Untuk membentuk masyarakat baru? Ya, hanyasayang di waktu sebelumnya yang ‘memberi bentuk’ adalah aktor-aktor serta sistem neoliberal yang datang ke Sarimukti, dan itu mengarah ke segregasi sosial serta ketimpangan.

Sekolah-sekolah umum di Sarimukti (atau dimanapun) menjadi cerminan

dari sistem pendidikan Gaya Bank, dimana peran pendidik adalah mengatur cara “dunia masuk ke dalam” diri para murid, menabung informasi, dan murid hanya menyimpan dengan rapi (Freire, 1986)²⁵. Usaha untuk berpikir menjadi sebuah kegiatan yang tidak layak untuk dilakukan, malahan berulang-ulang siswa diminta untuk menghafal serangkaian data yang kerap kali tak ada kaitan dengan kebutuhannya atau yang dibutuhkan oleh lingkungannya. Sudah saatnya di negeri ini mengedepankan konsep ‘pendidikan aktif’, adaptif, manusiawi, dan revolusioner. Dengan cara tersebut, masyarakat yang terpinggirkan dapat menemukan jalan keluar lewat harapan pendidikan. Sebuah kalimat teoritis dan evokatif dilontarkan oleh John Fien;

..sistem pendidikan untuk menopang masa depan yang paling baik adalah mencari cara untuk mendorong dan memberi kuasa pada murid untuk memilih kemajuan perubahan dan terus menyokong pembangunan dengan berkaca pada cara-cara mereka hidup. (Yencken, Fien & Sykes, 2000: 257)

Sarimukti adalah satu yang terlihat dari sekian banyak masalah serupa di Indonesia, seperti di banyak daerah pesisir, di bukit barisan, atau pulau-pulau terpencil seperti di Tenggara Jauh Indonesia. SMK Pertanian Sarimukti, yang dibangun dengan segelintir ide dan segelintir modal dengan mengusung ideologi dan kurikulum non-sentralistik (atapun non-industrialistik) muncul untuk menjawab hal tersebut. Sarimukti bangkit melawan neoliberalisme lewat tubuh sekolah. Pendidikan sejati menjawab tantangannya.

-tulisan ini di dedikasikan untuk orang-orang kalah yang mau bangkit untuk menang-

25 Dalam konteks guru-murid, Freire menyusun daftar antagonisme pendidikan gaya bank itu seperti: a. Guru tahu segalanya, murid tidak tahu apa-apa, b. Guru berpikir, murid dipikirkan, c. Guru mengatur, murid diatur, d. Guru mengacaukan wewenang ilmu pengetahuan dengan wewenang profesionalismenya, dan mempertentangkannya dengan kebebasan murid-murid, e. Guru memilih dan memaksakan pilihannya, murid menuruti.

Bibliografi

Pustaka Buku

- Bourdieu, Pierre. 1984. *Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste* (Third Englishtranslation). London: Routledge
- Chomsky, Noam. 2003. *Neoliberalism and Global Order*. New York: Seven Stories Press
- Claessen, H.J.M. 1987. *Antropologi Politik: Suatu Orientasi* (terj.). Jakarta: Erlangga
- Fauzi, Noer (peny.). 2005. *Gerakan-Gerakan Rakyat Dunia Ketiga*. Yogyakarta: Resist Book
- Foucault, Michel. 1973. *The Order of Things: An Archeology of the Human Sciences*. New York: Vintage Books
- Foucault, Michel. 1979. *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. New York: Vintage Books
- Foucault, Michel. 1980. *The History of Sexuality. An Introduction. Vol I*. New York: Vintage Books
- Freire, Paulo. 1986. *Pedagogy of the Oppressed*. New York: Continuum
- Freire, Paulo. 2000. *Politik Pendidikan: Kebudayaan, Kekuasaan, dan Pembebasan* (terj.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Garner, Roberta. 1977. *Social Movements in America*. Chicago, IL: Rand McNally
- Geertz, Clifford. 1963. *Agricultural Involution: The Processes of Ecological Change in Indonesia*. Berkeley: University of California Press
- Geertz, Clifford. 1992. *Politik Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius
- Husken, Frans. 1998. *Masyarakat Desa dalam Perubahan Zaman: Sejarah Diferensiasi Sosial di Jawa 1830 - 1980* (terj.). Jakarta: Grasindo
- Khudori. 2004. *Neoliberalisme Menumpas Petani*. Yogyakarta: Resist Book
- Kalleberg, Arne L, & Berg, Ivar. 1987. *Work and Industry: Structures, Markets, and Processes*. New York: Plenum Press
- Laksono, P.M. dkk. 2000. *Permainan Tafsir: Politik Makna di Jalan pada Penghujung Orde Baru*. Yogyakarta: Insist Press
- Lombard, Denys. 1996. *Nusa Jawa: Silang Budaya*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Manning, Chris, & Effendi, Tadjuddin N. 1996. *Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal di Kota*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Mirsel, Robert. 2004. *Teori Pergerakan Sosial*. Yogyakarta: Insist Press
- Mollona, M., Geert De Neve, & Parry, J. 2009. *Industrial Work and Life: an Anthropological Reader. Vol 78*. Oxford & New York: Berg Publishers
- Robinson, Richard. 1986. *Indonesia: The Rise of Capital*. North Sidney: Allen & Unwin Pty Ltd
- Scott, James C. 1985. *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance*. New Haven: Yale University Press
- Scott, James C. 1990. *Domination and the Arts of Resistance. (Hidden Transcript)*. New Haven: Yale University Press
- Tanter, Richard, & Young, K. 1990. *The Politics of Middle Class Indonesia*. Victoria Australia: Centre of Southeast Asian Studies, Monash University

- Thompson, Paul. 1989. *The Nature of Work: An Introduction to Debates on The Labour Process* (Second Edition). London: The Macmillan Press Ltd
- Turner, Bryan S. 2008. *The Body & Society* (3rd Edition). London: Sage Publications Ltd
- Weber, Max. 1930. *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*. London: Allen & Unwin, New York: Scribners
- Weber, Max. 1947. *The Theory of Social and Economics Organization*. New York: Oxford University Press
- Willis, Paul. 1990. *Common Culture*. San Fransisco: Westview Press
- Wolf, Eric. 1969. *Peasant Wars of the Twentieth Century*. New York: Harper and Row
- Wrong, Dennis. 2003. *Max Weber: Sebuah Khazanah* (terj.). Yogyakarta: Ikon Teralitera

Pustaka Jurnal

- Borras, Saturnino M., Edelman, M., & Kay, Cristobal. 2008. "Transnational Agrarian Movements: Origins and Politics, Campaigns and Impact" di dalam *Journal of Agrarian Change*. Vol 8. Issue 2/3
- Davis, Diana K. 2006. "Neoliberalism, Environmentalism, and Agricultural Restructuring in Morocco" di dalam *The Geographical Journal*, Vol. 172, No. 2 (Jun., 2006), pp. 88-105
- Edelman, Marc. 2001. "Social Movements: Changing Paradigms and Forms of Politics" di dalam *Annu. Rev. Anthropol.* 2001. 30: 285-317
- Ferguson, James. 2009. "The Uses of Neoliberalism" di dalam *Journal Compilation. Antipode Vol. 41 No. S1 2009 ISSN 0066-4812*, pp 166-184 doi: 10.1111/j.1467-8330.2009.00721.x
- Harvey, David. 2006. "Neo-Liberalism as Creative Destruction" dalam *Geografiska Annaler. Series B, Human. Geography*, Vol. 88, No.2, *Geography and Power, The Power of Geography*, pp. 145-158
- Priyono, B.Herry. 2006. "Neoliberalisme dan Sifat Elusif Kebebasan" di dalam *Makalah Refleksi: Ketua Program Studi Pascasarjana STF Driyakara dalam acara "Pidato Kebudayaan"* DKJ., Taman Ismail Marzuki, Jakarta

E-Book

- Fien, John. 2000. "Listening to the Voice of Youth: Implications for Educational Reform" di dalam *Environment, Education and Society in the Asia-Pacific*. Yencken, D., Fien, J., & Sykes, H., 2000. London: Routledge
- Marx, Karl. 1867/1887. *Capital: A Critique of Political Economy. Volume I: The Process of Production of Capital*. Moscow: Progress Publishers (First English edition)
- 1844/1959. *Economic & Philosophic Manuscripts of 1844*. Moscow: Progress Publishers (First English edition)
- Marx, Karl, & Engels, Frederick. 1848/1888. *Manifesto of the Communist Party*. Moscow: Progress Publishers (First English edition)